

**RENCANA KERJA
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

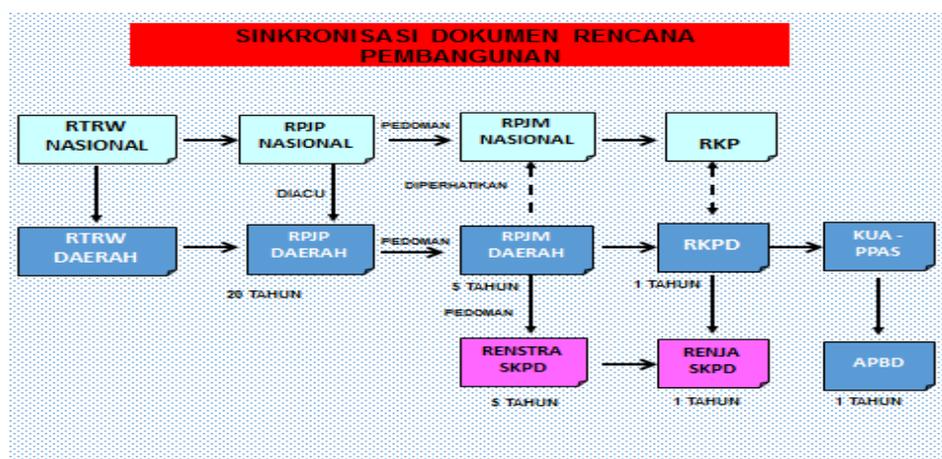
Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Trawas adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Trawas yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Trawas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
30. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Trawas 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Trawas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu

dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Trawas pada tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Realisasi belanja pada Kecamatan Trawas Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.799.367.302,00	2.312.091.641,00	82,59%	487.275.661,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.026.900,00	93,51%	973.100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	6.830.000,00	91,07%	670.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.196.900,00	95,96%	303.100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.224.234.302,00	1.773.676.553,00	79,74%	450.557.749,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.204.234.302,00	1.753.696.753,00	79,56%	450.537.549,00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000,00	19.979.800,00	99,90%	20.200,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.800.000,00	8.425.000,00	95,74%	375.000,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.800.000,00	8.425.000,00	95,74%	375.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.633.000,00	290.537.000,00	96,00%	12.096.000,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	7.200.000,00	90,00%	800.000,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.804.000,00	216.201.000,00	95,75%	9.603.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.229.000,00	18.700.000,00	97,25%	529.000,00
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	7.809.000,00	97,61%	191.000,00
10	Penyediaan Bahan/Material	17.000.000,00	16.187.000,00	95,22%	813.000,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.600.000,00	24.440.000,00	99,35%	160.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.200.000,00	78.031.988,00	91,59%	7.168.012,00
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	23.650.412,00	78,83%	6.349.588,00
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.200.000,00	54.381.576,00	98,52%	818.424,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	64.680.000,00	86,24%	10.320.000,00
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000,00	64.680.000,00	86,24%	10.320.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.500.000,00	82.714.200,00	93,46%	5.785.800,00
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Prmrliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	29.817.000,00	99,39%	183.000,00
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	1.500.000,00	997.500,00	66,50%	502.500,00

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	48.761.700,00	97,52%	1.238.300,00
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	3.138.000,00	44,83%	3.862.000,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000,00	26.013.000,00	65,03%	13.987.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.000.000,00	26.013.000,00	65,03%	13.987.000,00
19	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.000.000,00	5.611.000,00	56,11%	4.389.000,00
20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	30.000.000,00	20.402.000,00	68,01%	9.598.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	110.000.000,00	106.875.000,00	97,16%	3.125.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.000.000,00	106.875.000,00	97,16%	3.125.000,00
21	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	60.000.000,00	58.126.000,00	96,88%	1.874.000,00
22	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	48.749.000,00	97,50%	1.251.000,00
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.000.000,00	43.558.000,00	96,80%	1.442.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45.000.000,00	43.558.000,00	96,80%	1.442.000,00
23	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000,00	33.618.000,00	96,05%	1.382.000,00
24	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00	9.940.000,00	99,40%	60.000,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000,00	43.041.700,00	86,08%	6.958.300,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000,00	43.041.700,00	86,08%	6.958.300,00
25	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.000.000,00	7.981.700,00	99,77%	18.300,00
26	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.000.000,00	13.700.000,00	97,86%	300.000,00
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.000.000,00	6.230.000,00	77,88%	1.770.000,00
28	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	7.250.000,00	72,50%	2.750.000,00
29	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.000.000,00	7.880.000,00	78,80%	2.120.000,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100%
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	n/a	n/a	n/a	n/a	2 inovasi	3 inovasi	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100%

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7 dokumen	7 dokumen	100%
7.01.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	11 dokumen	11 dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang dapat tercapai	82,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	81,00%	81,00%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	67	n/a	n/a	n/a	n/a	65	65	100%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	82,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	81,00%	81,00%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2 paket	2 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2 paket	2 paket	100%

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Paket	2 Paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	82,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	81,00%	81,00%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Tenaga Kerja	4 Tenaga Kerja	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi	90,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100%
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan	7 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	11 Unit	11 Unit	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Unit	3 Unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	630 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	600 pelayanan	600 pelayanan	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	630 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	600 pelayanan	600 pelayanan	100%

7.01.03	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	82%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100%
7.01.03.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	31 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	23 Fasilitasi	23 Fasilitasi	100%
7.01.03.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	100%
7.01.03.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi	100%
7.01.03.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	100%
7.01.03.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Fasilitasi	7 Fasilitasi	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Trawas

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi
			Nilai SAKIB Perangkat Daerah
			Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target
			Persentase Realisasi Perangkat daerah
			IP ASN Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan
			Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan
			Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Trawas
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian						Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun n 2024 (n+1)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10				11				12	13
1	IKM Kecamatan			80	81	82	83	84		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			61	62	63	64	55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			81	81,55	82,25	82,95	83,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target			81 %	82 %	83 %	84 %	85 %											
5	Persentase Realisasi Perangkat daerah			81 %	82 %	83 %	84 %	85 %											
6	IP ASN Perangkat Daerah			81	82	83	84	85											

7	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan			80%	81 %	82 %	83 %	84 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti			81 %	82 %	83 %	84 %	85 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			605 pelayanan	630 pelayanan	655 pelayanan	680 pelayanan	705 pelayanan											
10	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat			23 Fasilitas	24 Fasilitas	24 Fasilitas	24 Fasilitas	24 Fasilitas											

2.3. Isu – Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebgaiian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Trawas

1. Faktor Kekuatan Organisasi

- Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
- Aparat Kantor Kecamatan Trawas bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Trawas;
- Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan terget kinerja yang telah di tuangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Trawas.

2. Faktor Kelemahan Organisasi

- Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi:
- Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai dalam memahami tugas pokok dan fungsi di dalam organisasi;
- Masih adanya aparatur yang kurang memahami teknologi informasi .
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Trawas namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

- Kecamatan Trawas merupakan kawasan wisata yang sedang berkembang.
- Banyaknya Usaha di bidang wisata membuka peluang masyarakat dalam peningkatan ekonomi
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
- Semakin tingginya partisipasi Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan.

- Faktor Tantangan Organisasi

- Masih tingginya keluhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
- Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Trawas yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Trawas untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2023 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2023-2024 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2024. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Reviw Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

N O	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	2.654.321.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	2.654.321.000	
		Kecamatan Trawas	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi			Kecamatan Trawas	Jumlah Inovasi yang terinternalis asi dan tersosialisas i serta berkelanjuta n	2 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	15.000.000	82%	15.000.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.500.000	7.500.000	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	7.500.000	7.500.000	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang dapat tercapai	82,00%	2.169.922.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	2.169.922.000	82,00%	2.169.922.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	2.169.922.000	2.169.922.000	Kecamatan Trawas	2.169.922.000	22 Orang/Bulan	2.169.922.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	IP ASN Perangkat Daerah	67	17.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	17.000.000	67	17.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Trawas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	17.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Trawas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	17.000.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	PersentasePen yediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	82,00%	179.850.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	PersentaseP enyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	82,00%	179.850.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	56.525.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	56.525.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	40.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	9.725.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	9.725.000

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokummen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokummen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.600.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket	24.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket	24.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	82,00%	115.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	82,00%	115.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	33.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	33.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	82.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	82.800.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi	90,00%	30.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi	90,00%	30.500.000	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	30.500.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	30.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	82%	126.249.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	82%	126.249.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	41.125.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	41.125.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	70.174.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	70.174.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	12 Unit	14.950.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	12 Unit	14.950.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Trawas	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	82%	37.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Trawas	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	82%	37.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	630 pelayanan	37.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	630 pelayanan	37.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	630 pelayanan	37.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	630 pelayanan	37.000.000	

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	82%	318.500.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	82%	279.300.000	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	31 Dokumen	318.500.000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	31 Dokumen	318.500.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	55.800.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6 Dokumen	55.800.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	43.300.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	6 Dokumen	43.300.000	

								Pembangunan Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	64.400.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	64.400.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	157.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen	157.000.000	
JUMLAH					3.009.821.000	JUMLAH					3.009.821.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Trawas melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Trawas secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Trawas ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2023 – 2026. Sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya pelayanan public yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada 2023 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	62	63	64	65
			Nilai SAKIP Perangkat daerah	81,55	81,60	81,65	81,70	81,75
			Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Persentase Realisasi Perangkat daerah	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
			IP ASN Perangkat Daerah	70	71	72	73	74
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	80	80,25	80,30	80,35	80,40
			Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	630 pelayanan	655 pelayanan	680 pelayanan	705 pelayanan
			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 Fasilitas	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Trawas Tahun 2023 mengacu pada Tujuan Kecamatan Trawas yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah :
 Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Trawas	81,60 (A)	2.654.321.000	APBD		81,65 (A)	3.052.449.304
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Trawas	82%	15.000.000	APBD		83%	20.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Trawas	2 dokumen	7.500.000	APBD		2 dokumen	10.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Trawas	1 dokumen	7.500.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang dapat tercapai	Kec. Trawas	82,00%	2.169.922.000	APBD		83,00%	2.385.724.304
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Trawas	22 Orang/Bulan	2.169.922.000	APBD		22 Orang/Bulan	2.385.724.304
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec. Trawas	71	17.000.000	APBD		72	25.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Trawas	22 Orang	17.000.000	APBD		22 Orang	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Kec. Trawas	82,00%	179.850.000	APBD		83,00%	226.325.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	1 paket	10.000.000	APBD		1 paket	12.000.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	7 Paket	56.525.000	APBD		7 Paket	75.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	40.000.000	APBD		12 Paket	40.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 paket	9.725.000			2 paket	9.725.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kec. Trawas	1 Dokumen	3.600.000	APBD		1 Dokumen	3.600.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	24.000.000	APBD		12 Paket	26.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Trawas	12 Laporan	36.000.000	APBD		12 Laporan	60.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Kec. Trawas	82,00%	115.800.000	APBD		83,00%	145.400.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Trawas	24 Laporan	33.000.000	APBD		24 Laporan	35.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 Laporan	82.800.000	APBD		12 Laporan	110.400.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi	Kec. Trawas	90,00%	30.500.000	APBD		90,00%	40.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Trawas	5 Paket	30.000.000	APBD		5 Paket	40.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	Kec. Trawas	82%	126.249.000	APBD		83%	210.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	41.125.000			1 Unit	45.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Trawas	3 Unit	70.174.000	APBD		3 Unit	150.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Trawas	12 Unit	14.950.000	APBD		12 Unit	15.000.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Trawas	82%	37.000.000	APBD		83%	40.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Trawas	630 pelayanan	37.000.000	APBD		655 pelayanan	40.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Trawas	19 Laporan	37.000.000	APBD		19 Laporan	40.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	Kec. Trawas	82%	318.500.000	APBD		83%	385.000.000
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Trawas	24 Dokumen	318.500.000	APBD		24 Dokumen	385.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Trawas	8 Dokumen	55.800.000	APBD		8 Dokumen	65.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Trawas	5 Dokumen	43.300.000	APBD		5 Dokumen	50.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen	64.400.000			5 Dokumen	70.000.000

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		13 Dokumen	157.000.000			13 Dokumen	200.000.000
Jumlah					3.009.821.000				3.477.449.304

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2023, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 4.01.28
 NAMA SKPD : KECAMATAN TRAWAS

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,60 (A)	Kecamatan Trawas	2.654.321.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		82%	Kecamatan Trawas	15.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku		2 dokumen	Kecamatan Trawas	7.500.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun		1 dokumen	Kecamatan Trawas	7.500.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		82%	Kecamatan Trawas	2.169.922.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang/Bulan	Kecamatan Trawas	2.169.922.000	-	-	-	-	-

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		71	Kecamatan Trawas	17.000.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Bimtek Peningkatan ASN yang dilaksanakan		22 Orang	Kecamatan Trawas	17.000.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		82%	Kecamatan Trawas	179.850.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 paket	Kecamatan Trawas	10.000.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		7 Paket	Kecamatan Trawas	56.525.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Paket	Kecamatan Trawas	40.000.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy		2 paket	Kecamatan Trawas	9.725.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		1 Dokumen	Kecamatan Trawas	3.600.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll		12 Paket	Kecamatan Trawas	24.000.000	-	-	-	-	-

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kecamatan Trawas	36.000.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82%	Kecamatan Trawas	115.800.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 Laporan	Kecamatan Trawas	33000000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	12 Laporan	Kecamatan Trawas	82.800.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	90%	Kecamatan Trawas	30.500.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	Kecamatan Trawas	30.000.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82%	Kecamatan Trawas	126.249.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Waktu Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 Unit	Kecamatan Trawas	41.125.000	-	-	-	-	-

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		3 Unit	Kecamatan Trawas	70.174.000	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik		12 Unit	Kecamatan Trawas	14.950.000	-	-	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0,82	Kecamatan Trawas	37.000.000	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		630 pelayanan	Kecamatan Trawas	37.000.000	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		19 Laporan	Kecamatan Trawas	37.000.000	-	-	-	-	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	0,82	Kecamatan Trawas	318.500.000	-	-	-	-	-

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		24 Dokumen	Kecamatan Trawas	318.500.000	-	-	-	-	-	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	Kecamatan Trawas	55.800.000	-	-	-	-	-	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen	Kecamatan Trawas	43.300.000	-	-	-	-	-	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen	Kecamatan Trawas	64.400.000	-	-	-	-	-	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		13 Dokumen	Kecamatan Trawas	157.000.000	-	-	-	-	-	
JUMLAH								3.009.821.000					

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Trawas merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Trawas selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2023, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Kecamatan Trawas ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Mojokerto, Desember 2022

KECAMATAN TRAWAS

SUGONDO, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670110 199003 1 007